



Polda Kalbar Tangani 14 Kasus Korupsi

PONTIANAK, TRIBUN - Penyidik Polda Kalbar fokus menyelesaikan 14 kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) yang tersebar diberbagai daerah.

“Ada 14 kasus yang sudah masuk tahap penyidikan,” kata Direskrimsus Polda Kalbar Kombes Widodo melalui Kasubdit Tipidkor Kompol Permadi Syahid Putra, Kamis (1/5).

Sejumlah kasus dugaan korupsi yang ditangani Polda Kalbar antara lain pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA) di Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang, yang mengaitkan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalbar. TPA tersebut dibangun dalam dua tahun anggaran, yakni tahun 2010 Rp 2,1 miliar dan tahun 2011 Rp 6,7 miliar.

Kerugian negara berkisar Rp 563 juta dengan tersangka MA selaku direktur perusahaan pelaksana, dan RK, pejabat pembuat komitmen di dinas terkait. Proyek tersebut berada di Bidang Cipta Karya Dinas PU Provinsi Kalbar. “Untuk kasus ini, semua tersangka sudah di-

periksa,” kata dia.

Kemudian, proyek irigasi di Kecamatan Jangkang, Kabupaten Sanggau, dengan kerugian negara sebesar Rp 1,02 miliar. Proyek tersebut juga melibatkan Dinas Pekerjaan Umum Kalbar.

Lalu, proyek jalan antara Sarawai-Ambalau di Kabupaten Sintang dengan kerugian negara Rp 5,7 miliar dari nilai anggaran Rp 6 miliar yang dialokasikan secara swakelola.

Tersangka yang ditetapkan dalam kasus tersebut adalah Kadis Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang As, pejabat pembuat komitmen RS, dan pejabat pelaksana teknis kegiatan Kam.

Kasus lain yang juga dalam penyidikan yakni dua berkas pengadaan bibit di Kabupaten Sanggau dan Sambas.

Selain itu, ada dugaan korupsi penyelesaian transponder satelit untuk memperluas jangkauan siaran TVRI setempat dengan kerugian negara mencapai Rp 1,6 miliar. Seluruh tersangka, yakni DID, SW dan MT, telah selesai diperiksa.

“Senin pekan depan akan kami serahkan berkasnya ke kejaksaan tinggi,” ujar Permadi.

Sedangkan untuk dugaan korupsi melalui bantuan sosial provinsi yang dialokasikan melalui anggaran tahun 2006-2008, hal itu masih dalam penyiapan penghitungan kerugian negara.

“Masih ada beberapa pemberkasan tambahan yang harus dilengkapi penyidik ke BPK karena ini masuk dalam rangkaian penghitungan kerugian negara,” kata mantan Wakapolres Bengkulu itu.

Dalam kasus tersebut, dua tersangka telah ditetapkan, yakni Zul dan UJ. Keduanya berstatus anggota DPR RI. Polda Kalbar sendiri ditargetkan dalam satu tahun dapat menyelesaikan penanganan delapan kasus korupsi.

Secara keseluruhan, ada 30 perkara dugaan korupsi yang ditangani penyidik di lingkungan Polda Kalbar. Menurut dia, setelah 14 kasus tersebut tuntas, akan dilanjutkan ke kasus lainnya. (ant)